

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dalam bab I dikemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Studi Kasus Penertiban Parkir Liar di Kota Bandung oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung) ditinjau dari aspek *logic of the policy, incentive of adaption phase, essential elements, availability of implementer*. Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang peneliti temukan mengenai penyelenggaraan perhubungan khususnya parkir liar di Kota Bandung yang sudah lama berjalan ini, dimana manfaat penelitian bukan lagi menilai apakah program layak untuk dilanjutkan atau tidak. Melainkan lebih kepada memberikan masukan dalam pengambilan keputusan sumberdaya dan kepatuhan dalam penyelenggaraan perhubungan khususnya parkir liar kedepannya. Fokus penelitian ini yaitu kepada Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, karena menurut peneliti pada proses ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap ketercapaian Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Karena pada proses Penyelenggaraan Perhubungan tidak hanya semata-mata membuat ketertiban lalu lintas, melainkan terselenggara pelayanan perhubungan yang terpadu dan

terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat, terselenggaranya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal, dan terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab V tersebut maka dapat menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Pada bab V diceritakan mengenai bagaimana pelaksanaan sumberdaya Dinas Perhubungan Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012, sehingga dapat ditemukan celah untuk bisa mengetahui lebih dalam apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan guna pengambilan keputusan Perda kedepannya. Untuk menilai kepatuhan dan sumberdaya Dinas Perhubungan Kota Bandung secara mendalam, *logic of the policy*, *incentive of adaption phase*, *essential elements*, *availability of implementer* yang telah dicapai. Dengan menguraikan keempat komponen tersebut, dapat diketahui bagaimana kepatuhan dan sumberdaya Dinas Perhubungan Kota Bandung seharusnya dilakukan dan bagaimana hasilnya untuk bisa menilai ketercapaian tujuan Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan khususnya pada parkir liar. Berikut pertanyaan penelitian yang dikemukakan dan bagaimana kesimpulannya yang telah peneliti tulis sebagai bab V dalam penelitian ini:

- *Logic of the policy*,

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai faktor kegagalan dan

keberhasilan suatu kebijakan dari aspek logika kebijakan, dapat dikatakan bahwa terdapat logika yang jelas dalam kebijakan penertiban parkir liar. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 yang menjadi dasar dari kebijakan penertiban parkir liar di Kota Bandung sudah cukup jelas dan rinci dengan dibantu oleh SOP penertiban parkir liar yang merupakan turunan dari Perda No 16 Tahun 2012, karena dalam perda ini telah dijelaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai dan juga terdapat standar ataupun ketentuan dalam menjalankan kebijakan penertiban parkir liar ini. Sehingga, Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan diharapkan dapat menggunakan perda ini sebagai pedoman dasar dalam mengimplementasi kebijakan penertiban parkir liar di Kota Bandung. Namun pada kenyataannya, Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung belum sepenuhnya melakukan atau menjalankan kebijakan penertiban parkir liar sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari cara penindakan yang dilakukan oleh Staf Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung kepada pelanggar yang melakukan parkir di zona dilarang parkir. Seharusnya Staf Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung menindak tegas para pelanggar dengan cara melakukan pengembokan ban dan menempelkan stiker pada kendaraannya, bukan hanya memilih salah satu namun harus dilakukan keduanya secara

bersamaan.

- *Incentive of adaption phase,*

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai faktor kegagalan dan keberhasilan suatu kebijakan dari aspek dorongan atau insentif, dapat dikatakan bahwa Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung memiliki upaya untuk melakukan dorongan atau insentif kepada petugas-petugasnya yaitu berupa sanksi atau hukuman. Sanksi yang diberikan sesuai dengan Perda No 16 Tahun 2012. Sehingga, petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat patuh dan tunduk kepada aturan dan standar yang telah ditetapkan, yaitu Perda No 16 Tahun 2012 dan SOP penertiban parkir liar dalam menjalankan kebijakan penertiban parkir liar. Hal ini dapat dilihat dari Dinas Perhubungan yang memberikan sanksi secara tegas terhadap petugasnya dengan cara memindahkan tempat tugas dan juga mengeluarkannya secara tidak hormat jika mengulangi pelanggaran kembali.

- *Essential elements,*

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai faktor kegagalan dan keberhasilan suatu kebijakan dari aspek sumberdaya, dapat dikatakan bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari petugas lapangan Dinas Perhubungan Kota Bandung yang

hanya berjumlah 22 orang yang berarti hanya sebagian dari jumlah ideal yaitu 40 orang. Akibatnya, petugas Dinas Perhubungan tidak dapat melakukan patroli keliling Kota Bandung dikarenakan kurangnya jumlah petugas yang turun langsung ke lapangan. Selain itu juga gembok ban yang merupakan benda yang sangat penting dalam proses penindakan pun tidak mencukupi. Gembok ban yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung hanya sebanyak 160 buah, itupun termasuk gembok yang sudah mulai rusak. Jumlah tersebut belum memenuhi jumlah ideal yaitu minimal gembok ban yang wajib disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah sebanyak 200 buah. Hal ini mengakibatkan petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung mengalami kesulitan dalam melakukan penindakan terhadap kendaraan yang terparkir secara liar. Selain itu juga kendaraan khususnya mobil yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung hanya berjumlah 3 buah, sedangkan petugas Dinas Perhubungan terbagi menjadi 4 lokasi dalam melakukan patroli setiap harinya. Sehingga hal ini juga menghambat proses implementasi penertiban parkir liar di Kota Bandung.

- *Availability of implementer,*

kesimpulan yang dapat diambil mengenai faktor kegagalan dan keberhasilan suatu kebijakan dari aspek kemampuan dan pengetahuan, petugas Dinas Perhubungan sudah memiliki

pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan kebijakan implementasi penertiban parkir liar. Hal ini dapat dilihat dari petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung mengetahui tata cara penertiban parkir liar Kota Bandung yang berdasar pada Perda No 16 Tahun 2012. Selain itu juga petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung yang turun langsung ke lapangan dapat secara mahir melakukan pemasangan gembok pada ban kendaraan dan juga mampu melepaskan gembok tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan peneliti untuk Dinas Perhubungan dalam Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan khususnya pada parkir liar, adalah sebagai berikut:

1. Sumberdaya manusia merupakan hal terpenting dalam keberhasilan implementasi, maka dari itu Dinas Perhubungan Kota Bandung membutuhkan adanya penambahan petugas yang turun langsung ke lapangan. Jumlah yang ideal adalah sebanyak 40 orang sedangkan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung hanya sebesar 22 orang sehingga dibutuhkan penambahan jumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung sebanyak 18 orang untuk mencapai jumlah yang ideal agar kebijakan mendapatkan peluang yang tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Selain sumberdaya manusia yang perlu diadakan pengadaan adalah sumberdaya pendukung lain yaitu gembok ban dan juga kendaraan. Gembok merupakan salah satu faktor pendukung yang penting. Gembok ban sangat diperlukan untuk efektifnya sebuah kebijakan dijalankan atau diimplementasikan. Dengan adanya gembok ban maka kegiatan implementasi penertiban parkir liar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Maka dari itu dibutuhkan penambahan gembok yang baru sebanyak kurang lebih 60 buah. Hal ini dikarenakan jumlah gembok yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung belum mencapai jumlah ideal yaitu hanya sebanyak 140 buah, sedangkan jumlah yang ideal adalah sebanyak 200. Begitupun dengan kendaraan sebagai pendukung dalam melakukan kegiatan patroli yang merupakan salah satu prosedur dan ketentuan yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menjalankan penertiban parkir liar. Jumlah kendaraan Dinas Perhubungan Kota Bandung dinilai belum mencapai jumlah ideal yakni 4 buah mobil dan 4 buah truk. Maka dari itu dibutuhkan pengadaan kendaraan demi berjalannya kebijakan penertiban parkir liar di Kota Bandung ini mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Dengan terpenuhinya sumberdaya berupa petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung, gembok ban, dan juga kendaraan, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesesuaian petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menjalankan atau mengimplementasikan penertiban parkir liar di Kota Bandung. Sehingga kebijakan penertiban parkir liar ini dapat

mencapai tujuan yang diinginkan yaitu:

- Terselenggaranya pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
- Terselenggaranya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal;
- Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James. 1998. *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company
- David L. Weimer and Aidan R. 2010. *Vining, Policy Analysis: Concepts and Practice*, New Jersey: Uppersaddle
- Dharminto. 2013. *Metode dan Penelitian Sampel*. Jurnal Universitas Dipenogero
- Hasan, Ir. M. Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghaia Indonesia
- John, Creswell W. 2011. *Educational Reasearch: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston. Pearson
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Lexy J, Moleong. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Miles and Huberman, *Qualitative Data Analisis: a method sourcebook*. California: SAGE
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Setiawan Guntur.2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, Bandung:
Remaja Rosdakarya Offset

Suryana. 2010. Metodologi Penelitian “Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan
Kualitatif, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

Silalahi, Ulber. 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung. Bina
Budhaya

Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Pnelitian Sosial*. Bandung. UNPAR PRESS

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Refika Aditama

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: CV.
Alfabeta

Thomas R. Dye. 2010. Understanding Public Policy, New Jersey: Eleventh
Edition

Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada

Dokumen

Data Jumlah Pelanggar Parkir Liar Tahun 2013-2015

Daftar Tempat Parkir Liat Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan

Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandung